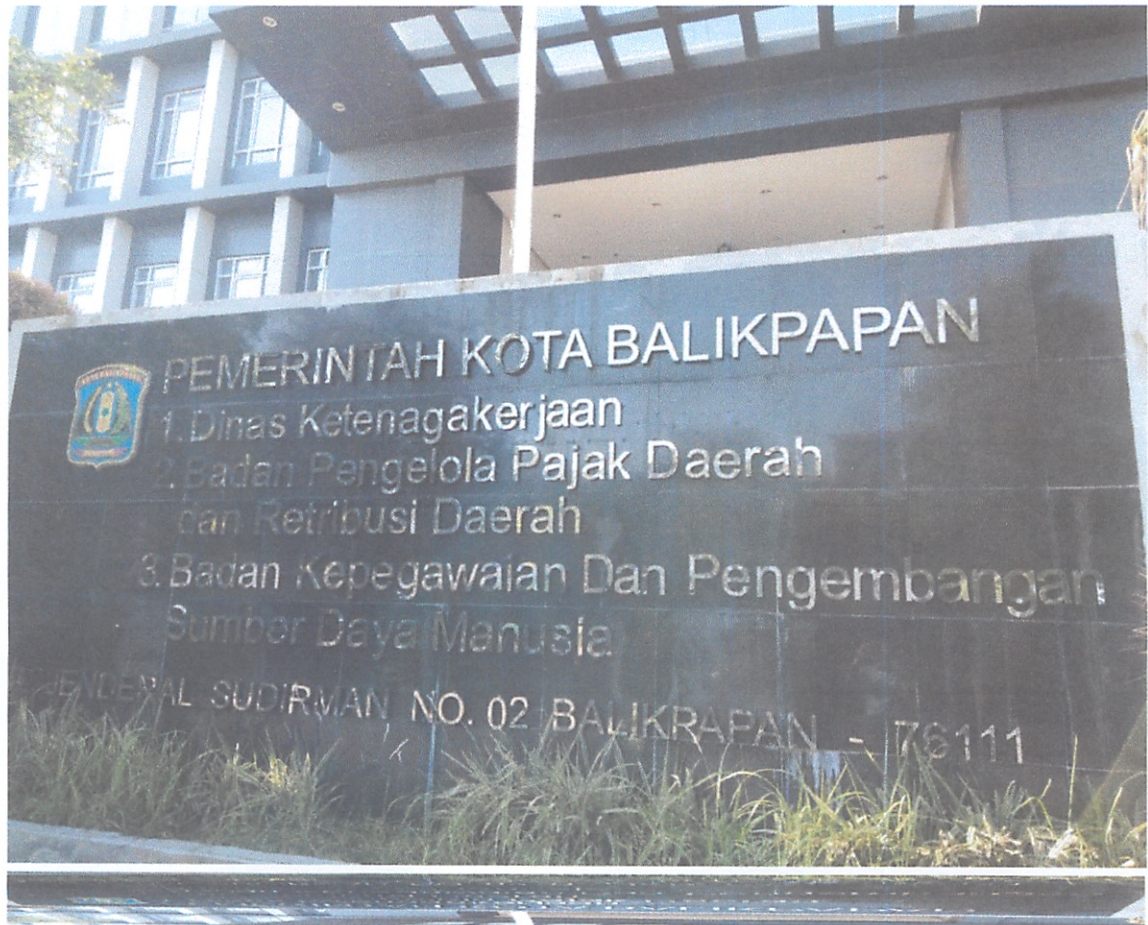


**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2017**



**DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BALIKPAPAN**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

RPJMD Kota Balikpapan periode 2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih pada periode tersebut, selanjutnya dijadikan acuan dalam perencanaan pencapaian target kinerja SKPD yang dituangkan dalam Renstra.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketenagakerjaan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Tahun 2017.

Laporan ini disusun sesuai format pelaporan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi menurut Wright dkk (1996:188) merupakan bentuk cara di mana tugas dan tanggungjawab dialokasikan kepada individu, di mana individu tersebut dikelompokkan ke dalam kantor, departemen, dan divisi. Struktur tersebut seyogyanya senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan publik dan lingkungan dalam rangka terciptanya kinerja organisasi yang efektif dan proses kerja yang cepat.”

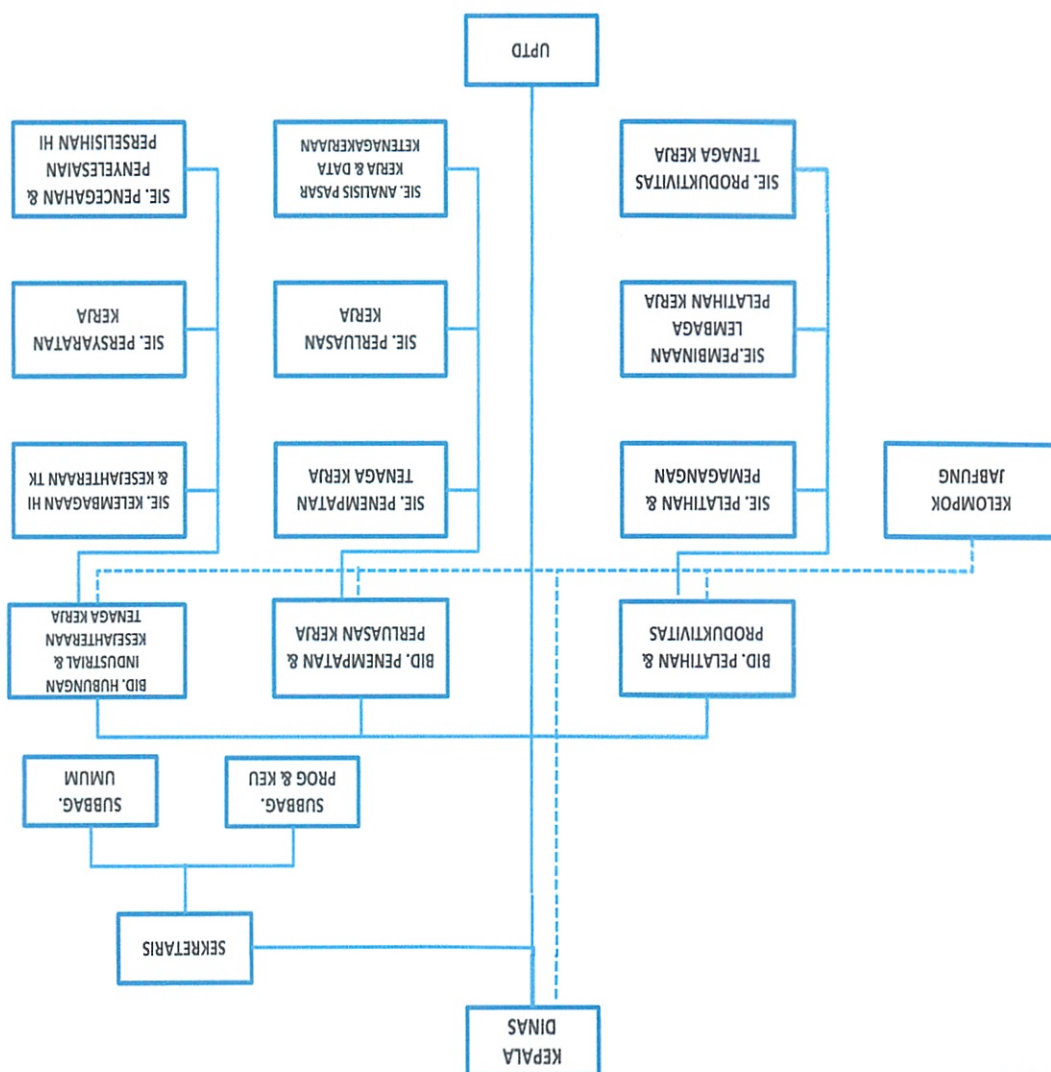
Sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan diatur sebagai berikut :

1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan sebagai penyelenggara urusan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Aspek-aspek strategis ketenagakerjaan meliputi :

- jumlah angkatan kerja, jumlah penempatan tenaga kerja,
- kualitas dan produktivitas tenaga kerja,
- jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial,



Adapun aspek strategis bidang ketenagakerjaan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Disnaker Kota Balikpapan periode 2016-2021 :

	BIDANG	ASPEK STRATEGIS
a.	Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	- Tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan produktif ;
b.	Penempatan dan Perluasan Kerja	- Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
c.	Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	- Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

1.4. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan tantangan bagi organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk kebijakan sebagai langkah penyelesaiannya. Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) bidang ketenagakerjaan yang dihadapi organisasi :

1. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja;
2. Peningkatan pelayanan antar kerja;
3. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial; penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja di Kota Balikpapan, baik yang berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, maupun pelatihan kewirausahaan sehingga memiliki keterampilan/skill yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

Peningkatan pelayanan antar kerja melalui pelaksanaan Job Market Fair, penyuluhan bimbingan jabatan, layanan konseling kepada pencari kerja, bimbingan motivasi kepada pencari kerja dalam bentuk Wednesday inspiring serta fasilitasi tempat rekrutmen bagi Perusahaan.

Penurunan perselisihan hubungan industrial melalui peningkatan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik dalam bentuk penyuluhan, bimtek, sosialisasi, monitoring, dan pelayanan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Visi Disnaker Kota Balikpapan adalah “Terwujudnya tenaga kerja berdaya saing tinggi dalam iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang menjamin kelangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh”, dan dijabarkan dalam misi berikut :

- Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja
- Meningkatkan perluasan kesempatan kerja
- Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan kelembagaan Hubungan Industrial

Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Disnaker dijelaskan pada tabel 2.1. di bawah ini :

**Tabel 2.1. Tujuan ,Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Disnaker Kota Balikpapan
(Periode Renstra 2016 – 2021**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan pasar kerja	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan produktif	Peningkatan keterampilan /skill pencaker	$\frac{\sum \text{Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan}}{\sum \text{Pencari kerja yang menjadi target pelatihan}} \times 100\%$	75 %	78 %	80 %	82 %	84 %
Meningkatkan penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\sum \text{Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan}}{\sum \text{Lowongan kerja terdaftar}} \times 100\%$	22.15 %	22.20 %	22.25 %	22.30 %	22.35 %
Mewujudkan perlindungan tenaga kerja, pengembangan kelembagaan Hubungan Industrial dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.	Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB)	$\frac{\sum \text{Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial dengan PB}}{\sum \text{Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang dicatatkan}} \times 100\%$	50%	50%	50%	50%	50%

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan Disnaker Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017, dijelaskan pada tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel 2.2. RKT Disnaker Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	
1	2	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,663,370,000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 2,550,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 21,300,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 8,000,000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 3,165,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 102,771,500
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 68,861,500
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 2,500,000
8	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 141,305,000
9	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Rp 294,850,000
10	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Rp 1,018,067,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 212,825,000
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 106,000,000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 16,200,000
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 6,625,000
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 35,500,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 48,500,000
III	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp 79,135,000.00
1	Pengelolaan Data & Perencanaan Ketenagakerjaan	Rp 79,135,000
IV	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Rp 330,840,000.00
1	Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin	Rp 330,840,000
V	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp 325,255,000.00
1	Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Rp 100,450,000
2	Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam penetapan UMK	Rp 138,355,000
3	Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja	Rp 60,540,000
4	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Rp 25,910,000
VI	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 143,307,000.00
1	Pelayanan Antar Kerja	Rp 112,772,000
2	Perluasan Kesempatan Kerja	Rp 30,535,000
VII	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 903,697,500.00
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Rp 811,400,000
2	Penyelenggaraan Pemagangan	Rp 31,050,000
3	Pembinaan LPK	Rp 45,560,000
4	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	Rp 15,687,500
TOTAL		Rp 3,658,429,500

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Disnaker Kota Balikpapan dijelaskan sebagaimana berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2017	
			Target	Realisasi
1.	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan produktif	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan;	100%	
2.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar kerja	1. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	24 %	
		2. Persentase calon wirausaha yang mendapatkan pembinaan	50 %	
3.	Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB)	50 %	

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 620.586.300	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 398.950.000	
3.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Rp 260.700.000	
4.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp 180.537.500	
5.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 131.612.000	
6.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 696.905.000	
7.	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp 48.0000000	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Adapun capaian kinerja Disnaker pada tahun anggaran 2017 dijelaskan dalam tabel 3.1.1. di bawah ini :

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Disnaker Kota Balikpapan Tahun 2017

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2016		2017		KET
					T	R	T	R	
1.	Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan pasar kerja	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan produktif	1. Peningkatan keterampilan/Skill Pencaker	%	70	51.47	75 %	60.66	
2.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	0	0	22.15	32.45	Pada program sebelumnya tidak menjadi IKU
3.	Mewujudkan perlindungan tenaga kerja, pengembangan kelembagaan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB)	kasus	50	48.18	50	53.13	

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Adapun kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar. Berdasar pengertian tersebut, maka pelatihan kerja berbasis kompetensi didefinisikan sebagai pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan layanan pelatihan kerja asis kompetensi pada Tahun 2017 terjadi Kenaikan jika di banding Tahun 2016. Capaian kinerja penyelenggaraan pelatihan saat ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah, mengingat penyelenggaraan pelatihan memerlukan biaya yang cukup besar, selain itu perlu pula didukung dengan ketersediaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi. Adapun hasil (outcome) pelatihan yang diharapkan adalah

meningkatkan kualitas pencari kerja, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Adapun yang dimaksud kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja, sedangkan yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah.

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan penempatan pencari kerja terdaftar pada Tahun 2017 terjadi Kenaikan jika di banding Tahun 2016. Faktor yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain :

- Pelaksanaan Wednesday Inspiring
- Pelaksanaan Job Market Fair
- Pelaksanaan Bimbingan Jabatan
- Peningkatan layanan Pencaker melalui Aplikasi (SIMTK)
- Dan lain - lain

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Tahun 2017 terjadi Kenaikan jika di banding Tahun 2016. Faktor yang mempengaruhi catatan tersebut antara lain :

- Pelaksanaan monitoring dan pembinaan perusahaan secara intensif
- Peningkatan layanan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Ketenagakerjaan dalam Hubungan Industrial (SIMPATI)

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Disnaker Kota Balikpapan tahun 2017 dijelaskan pada tabel 3.2. di bawah ini :

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2017
Disnaker Kota Balikpapan**

**LAPORAN MONITORING KEGIATAN APBD KOTA BALIKPAPAN
BELANJA LANGSUNG
BULAN DESEMBER 2017**

INSTANSI : DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KPA/PPTK	PROGRAM/KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BOBOT KEGIATAN	REALISASI				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN
			JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)		FISIK (%)	TTB.	KEUANGAN (Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KPA : Asfiansyah,SE PPTK : Hj. Masindra	I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,663,370,000	1,600,770,500							
		01. Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,550,000	1,590,000	0.06	91.56	0.05	1,364,000	85.79	226,000	Sisa Pagu Dana Belanja Paket/Pengiriman.
		02. Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,300,000	16,440,000	0.60	100.00	0.60	14,281,936	86.87	2,158,064	Sisa Pagu Dana Belanja Air Rp. 1.497.027,- dan Belanja Listrik Rp. 661.037,-.

		03. Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8,000,000	6,300,000	0.23	100.00	0.23	6,284,000	99.75	16,000	Sisa Pagu Dana Belanja Pajak Kendaraan Bermotor.
		04. Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,165,000	2,685,000	0.10	100.00	0.10	2,685,000	100.00	-	
		05. Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor	102,771,500	100,171,000	3.64	100.00	3.64	99,689,500	99.52	481,500	Sisa Pagu Dana Belanja Alat Tulis Kantor.
		06. Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68,861,500	41,375,000	1.50	100.00	1.50	38,384,000	92.77	2,991,000	Sisa Pagu Dana Belanja Penggandaan.
		07. Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000	2,450,000	0.09	100.00	0.09	2,450,000	100.00	-	
		08. Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman	141,305,000	71,842,500	2.61	100.00	2.61	69,022,600	96.07	2,819,900	Sisa Pagu Dana Belanja Persediaan Makanan Pokok Rp. 128.000,- , Makanan dan Minuman Rapat Rp 100.000,- serta Tamu Rp 2.591.900,-.

		09.	Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.01.018. Rapat-rapat Koordinasi,Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	294,850,000	339,850,000	12.35	98.28	12.14	317,100,987	93.31	22,749,013	Sisa Pagu Dana Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 7.370.023,- dan Luar Daerah Rp. 15.378.990,-.
	KPA : Asfiansyah,SE PPTK : Hj. Masindra	10.	Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.01.019. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	1,018,067,000	1,018,067,000	36.99	100.00	36.99	653,194,811	64.16	364,872,189	Sisa Pagu Dana Honorarium E-Kinerja Rp. 293.301.189,- dan Honorarium Pegawai Honorar/Tid ak Tetap yang mengundurk an diri dari Disnaker Rp. 59.478.000,- serta Honorarium Pegawai Honorar/Tid ak Tetap Bln Desember yang belum dibayarkan Rp. 12.093.000,-.
		II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	212,825,000	108,800,000							
		11.	Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6,625,000	6,450,000	0.23	100.00	0.23	4,850,000	75.19	1,600,000	Sisa Pagu Dana Belanja Spanduk dan Banner.
		12.	Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	35,500,000	-	-	0.00	0.00	0	0.00	-	Rasionalisasi

	KPA : Dra. Mufidah Hayati	13.	Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	16,200,000	14,850,000	0.54	100.00	0.54	14,850,000	100.00	-	Sisa Pagu Dana Belanja Jasa Service Kendaraan termasuk Body Repair Rp. 21.852.677,- dan Belanja Penggantian Suku Cadang Rp. 861.721,-. Sisa Pagu Dana Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Sound Sistem) Rp. 350.000,- dan Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Rp. 23.765.000,-.
		14.	Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	106,000,000	43,000,000	1.56	100.00	1.56	20,285,602	47.18	22,714,398	
		15.	Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	48,500,000	44,500,000	1.62	83.93	1.36	20,385,000	45.81	24,115,000	
		III.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	903,697,500	625,300,600							
		16.	Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.15.010. Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	811,400,000	561,400,000	20.40	100.00	20.40	561,400,000	100.00	-	
	PPTK : Eva Martini Hidayat,ST											

		17.	Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.15.011. Penyelenggaraan Pemagangan	31,050,000	28,950,000	1.05	94.38	0.99	25,672,500	88.68	3,277,500	Sisa Pagu Dana Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Rp. 3.000.000,- dan Belanja Penggandaan Rp. 277.500,-.
	PPTK : Suriansyah	18.	Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.15.012. Pembinaan LPK	45,560,000	34,950,600	1.27	100.00	1.27	29,963,100	85.73	4,987,500	Sisa Pagu Dana Belanja Jasa Narasumber Rp. 4.987.500,-. Rasionalisasi
		19.	Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.15.013. Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	15,687,500	-	-	0.00	0.00	0	0.00	-	
	KPA : Bambang Supriyanto,SH .M.Si PPTK : HJ.Rosdiana,S. Sos PPTK : Mulyono,A.Md	IV.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	143,307,000	90,266,000							
		20.	Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.16.008. Pelayanan Antar Kerja	112,772,000	90,266,000	3.28	100.00	3.28	90,266,000	100.00	-	
		21.	Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.16.009. Perluasan Kesempatan Kerja	30,535,000	-	-	0.00	0.00	0	0.00	-	Rasionalisasi

	KPA : Niswaty,SH,M. AP PPTK : Drs. Parman	V. PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	325,255,000	57,123,000							
		22. Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.17.009. Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100,450,000	25,860,000	0.94	100.00	0.94	19,259,000	74.47	6,601,000	Sisa Pagu Dana Belanja Jasa Paket/Pengiriman Rp. 3.781.000,- dan Belanja Penggandaan Rp. 2.820.000,-.
	PPTK : Ir. Sentot Purwandono Prasasto	23. Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.17.010. Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK	138,355,000	29,463,000	1.07	100.00	1.07	28,543,000	96.88	920,000	Sisa Pagu Dana Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Rp. 300.000,-.
		24. Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.17.011. Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja	60,540,000	-	-	0.00	0.00	0	0.00	-	Rasionalisasi
		25. Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.17.012. Pemasyarakatan Hubungan Industrial	25,910,000	1,800,000	0.07	100.00	0.07	1,800,000	100.00	-	

	KPA : Dra. Mufidah Hayati	VI. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU	330,840,000	269,680,000							
	PPTK : Eva Martini Hidayat,ST	26. Kode Rekening 1.02.01.1.02.01.01.18.001. Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin	330,840,000	269,680,000	9.80	100.00	9.80	269,680,000	100.00	-	
	KPA : Bambang Supriyanto,SH .M.Si	VII. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	79,135,000	-							
	PPTK : Mulyono,A.Md	27. Kode Rekening 3.00.02.1.02.01.01.15.006. Pengelolaan Data dan Perencanaan Ketenagakerjaan	79,135,000	-	-	0.00	0.00	0	0.00	-	Rasionalisasi
J U M L A H			3,658,429,500	2,751,940,100	100.00	98.55	99.46	2,291,411,036	83.27	460,529,064	

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017.

Dimasa mendatang akan diupayakan kerja keras dan semangat yang tinggi dari seluruh jajaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dan dukungan dari Pemerintah Kota Balikpapan serta masyarakat untuk meningkatkan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

Dengan disusunya

LAKIP Tahun 2017 ini, diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka Peningkatan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah menuju terciptanya asas pemerintahan yang baik (*Good Government*), akuntabel serta transparan.

Balikpapan, Februari 2018

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BALIKPAPAN

TIRTA DEWI